Kata Sambutan
Rektor Universitas Muslim Indonesia Makassar
Prof. Dr. H. Basri Modding, SE. MSi

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

**Dr. Kamri Ahmad, SH. M.Hum,
Andi Khaedhir K Petta Lolo, SH**

Pengantar Hukum Indonesia

Oleh : * Dr. Kamri Ahmad, SH.,M.HUM
*** Andi Khaedir K. Petta Lolo, SH ;**
Ed. I., Cet. I.- Makassar

PT. UMITOHA UKHUWAH GRAFIKA

vii, 236 hal . 24 x 16 cm

ISBN : 978-602-8828-72-7

Hak Cipta 2019, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin foto copy, tanpa izin penerbit.

Cetakan pertama, Oktober 2019

Pengantar Hukum Indonesia

Hak Penerbit pada PT. UMITOHA UKHUWAH GRAFIKA, Makassar
Lay Out & Desain Cover : *Nur Diana, SE.*

Dicetak oleh percetakan : PT. UMITOHA, Makassar
Isi diluar tanggungjawab percetakan

PT. UMITOHA UKHUWAH GRAFIKA
Jl. Abdullah Dg. Sirua No. 264 C Telp. 0411-436974
Makassar 90231

Anggota IKAPI, Nomor : 017/SSL

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Oleh:

*** Dr. Kamri Ahmad, SH.,M.HUM**

*** Andi Khaedir K. Petta Lolo, SH**

Penerbit PT Umitoha Ukhuwah Grafika
Makassar, 2019

Kata Sambutan

Rektor Universitas Muslim Indonesia Makassar

Assalamu Alaikum wr.wb

Usaha untuk menulis buku tentang Pengantar Hukum Indonesia (PHI) oleh Dr. Kamri Ahmad, SH. M.Hum dan Andi Khaedhir, SH adalah hal yang sangat diperlukan untuk membantu mahasiswa agar lebih memahami hukum positif Indonesia. Tentu ini suatu tambahan *literature* yang sangat bermanfaat dalam kepustakaan hukum. Buku ini diharapkan memberi banyak pemahaman dasar yang diperlukan untuk memahami ilmu hukum pada umumnya bagi para mahasiswa dan pembaca lainnya.

Untuk suatu pengetahuan dasar yang bersifat pengantar, maka diperlukan banyak pengetahuan yang bersifat komprehensif terhadap tata hukum yang berlaku bagi para pembacanya. Oleh karena itu, untuk mencapai suatu langkah lebih lanjut, diperlukan adanya penulisan *literature* mengenai pengantar hukum Indonesia sebagai bagian tak terpisahkan dengan pengantar ilmu hukum. PHI mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pemahaman tentang hukum..

Semoga peranan itu dapat dipenuhi oleh para penulis khususnya, dan pengajar pengantar hukum Indonesia pada umumnya.

Makassar, 02 Mei 2019

Rektor Universitas Muslim Indonesia

Prof. Dr. H. Basri Modding, SE. MSi

Kata Pengantar Penulis

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Buku Pengantar Hukum Indonesia telah lama difikirkan sekitar dua tahun lebih dipersiapkan. Pada saat penulis mencoba memulai menulis buku ini, tetap saja mengambil perbandingan dengan sari materi seri kuliah catatan yang pernah penulis terima tahun 1985, dan membandingkan dengan perkembangan tata hukum Indonesia kekinian. Maka dari itu, isi buku ini penulis mencoba melihat perkembangan hukum positif Indonesia dewasa ini, terutama setelah terjadi reformasi tahun 1997-1998.

Pada saat memulai penulisan buku ini, satu hal yang penulis rasakan, bahwa ternyata menulis buku itu tidaklah mudah. Diperlukan suatu energy dan ketekunan dan terjaga secara obyektif dengan cara melalui pendekatan pustaka yang baru tanpa mengabaikan pustaka yang lama. Apalagi tata hukum Indonesia memiliki cakupan yang amat luas. Tentunya ini tidak mudah.

Atas penerbitan buku ini, tak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada penerbit. Dan secara khusus kepada Rektor UMI Makassar, Prof. Dr. Basri Modding, SE. MSi, dan Bapak Prof. Dr. H.A. Muin Fahmal, SH. MH yang telah bersedia menorehkan kata sambutan dan kata pengantar.

Makassar, 28 Februari 2019.

Penulis:

Dr. Kamri Ahmad, SH. M.Hum,
Andi Khaedhir K Petta Lolo, SH

Kata Pengantar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah patut kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan taufikNya-lah sehingga penulisan buku ini dapat terselesaikan, sekalipun mungkin di sana-sini masih terdapat kekurangan-kekurangan.

Buku tentang Pengantar Hukum Indonesia (PHI) yang dulu disebut Pengantar Tata Hukum Indonesia, buku yang ditulis oleh Saudara Dr. H. Kamri Ahmad, SH. M.Hum dan rekan, tentunya dapat memperkaya hasanah kepustakaan ilmu hukum. Buku ini sangat baik dan penting. Terlebih lagi, bahwa tata hukum Indonesia dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat dinamis. Perkembangan yang sangat dinamis itu perlu dibarengi dengan tulisan-tulisan yang dapat menyentuh sisi-sisi lain, yang mana pada tulisan-tulisan tentang tata hukum Indonesia masa dahulu belum terlihat.

Atas dasar yang demikian itu, seperti yang saya ketahui, bahwa penulis-penulis buku tentang hukum yang selama ini ada, khususnya di Universitas Muslim Indonesia belum begitu banyak. Oleh karena itu, kehadiran buku ini tentu sangat membantu dan menambah nuansa tersendiri dan tertentu kemutakhiran pustaka. Saya yakin, bahwa buku ini sangat bermanfaat bagi pembacanya.

Makassar, 15 Maret 2019

Prof. Dr. H. A. Muin Fahmal, SH. MH.

Guru Besar Ilmu Hukum, dan
Pembina Utama pada FH-UMI Makassar

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Tujuan Mempelajari PHI	1
B. Persamaan dan Perbedaan PIH dan PHI.....	3
C. Manusia Sebagai Bagian Dari Tata Hukum	5
D. Pengertian Hukum dan Ilmu Hukum	8
E. Pengertian Tata Hukum Indonesia	12
F. Mekanisme Tata Hukum Indonesia	15
G. Obyek Pengantar Hukum Indonesia	16
H. Sejarah Singkat Tata Hukum Indonesia	17
I. Perkembangan Politik Hukum Nasional di Indonesia	19
J. Perkembangan Sistem Peradilan di Indonesia	25
 II. PENGGOLOONGAN HUKUM	
(RECHTSBEDELING) DI INDONESIA	27
III. ISTILAH. PENGERTIAN DAN SUMBER-	
SUMBER TATA HUKUM	32
A. Istilah Sumber Hukum	32
B. Sumber Hukum Dalam Arti Materil	34
C. Sumber Hukum Formil/positif	37
1. Undang-Undang	37
2. Berakhirnya Suatu Undang-Undang	41
3. Dari Kebiasaan ke Hukum Kebiasaan	42

4.	Dari Adat ke Hukum Adat	43
5.	Traktat	45
6.	Keputusan Hakim (Yurisprudensi)	48
7.	Pendapat Sarjana (Doktrin)	51
IV.	PEMBAGIAN ATURAN- ATURAN HUKUM....	53
A.	Pembagian Hukum Menurut Bentuknya	53
B.	Menurut Fungsinya	55
C.	Menurut Kekuatan Sanksinya	55
D.	Menurut Cakupan Berlakunya	57
E.	Menurut Wilayah Berlakunya	58
F.	Menurut Isinya	60
V.	LAPANGAN-LAPANGAN HUKUM DI INDONESIA.	66
A.	HUKUM ADAT	69
1.	Pengertian Hukum Adat	69
2.	Sifat dan Corak Hukum Adat	70
3.	Lingkungan Khusus Hukum Adat	71
4.	Kukuban Hukum	72
5.	Dasar Hukum Berlakunya Hukum Adat di Indonesia	73
6.	Pembagian Aturan-Aturan Hukum Adat	75
7.	Lapangan Lapangan Hukum Adat	76
a.	Hukum Kekeluargaan	76
b.	Hukum Perkawinan	78
c.	Hukum Kewarisan	80

d. Hukum Pidana Adat	82
e. Hukum Kebiasaan	83
B. HUKUM ISLAM	84
1. Pengertian Hukum Islam	84
2. Priodisasi Hukum Islam di Indonesia	85
3. Sumber-Sumber Hukum Islam	88
4. Lapangan-Lapangan Hukum Islam	89
5. Sejarah Singkat Hukum Islam	91
C. HUKUM AGRARIA	92
1. Pengertian Hukum Agraria	92
2. Dasar Dasar Pokok Berlakunya Hukum Agraria	94
3. Masa Setelah Berlakunya UU. Pokok-Pokok Agraria Nomor: 5/1960	95
4. Jenis-Jenis Hak Atas Tanah	97
D. HUKUM PERDATA	99
1. Pengertian Hukum Perdata	100
2. Bagian-bagian Terpenting Dalam Hukum Perdata	101
a. Hukum Perorangan	101
b. Hukum Keluarga	102
c. Hukum Harta Kekayaan	103
3. Hukum Waris	105
a. Pengertian Hukum Waris	105
b. Pembagian Harta Warisan	105
4. Hubungan Hukum Perdata dan Hukum Dagang	109
5. Perkembangan Hukum di Lapangan Hukum Perdata.	110

E. HUKUM PERPAJAKAN	113
1. Pengertian Hukum Pajak	113
2. Dasar Hukum Pembenaan Pemungutan Pajak..	114
3. Macam-Macam Pajak	115
4. Pajak Tidak Langsung dan Pajak Lansung	118
F. HUKUM TATA NEGARA	119
1. Pengertian Hukum Tata Negara	119
2. Unsur-Unsur Pokok Terbentuknya Negara	120
3. Kekuasaan Tertinggi Dalam Negara	122
4. Asas Pokok Hukum Tata Negara Indonesia. ...	125
G. HUKUM TATA USAHA / HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	128
1. Pengertian Hukum Tata Usaha/Administrasi Negara	128
2. Sumber-Sumber Hukum Tata Usaha Negara...	130
3. Alat-Alat Perlengkapan Negara	136
H. HUKUM PIDANA	137
a. Pengertian Hukum Pidana	137
b. Sumber-sumber hukum pidana	139
c. Asas-asas hukum pidana	140
d. Macam-macam pidana	141
e. Sejarah Singkat KHUP Indonesia	143
 BAB VI. PANCASILADAN HIERARKHI PERUNDANG- UNDANGAN RI	 145
- Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara	149
- Pancasila Tanpa Indoktrinasi	150

- Indoktrinasi	151
- Pancasila Sebagai Rahmat Allah SWT Bagi Bangsa Indonesia	152

BAB VII HUKUM INTERNASIONAL	157
a. Pengertian Hukum Internasional	157
b. Hukum Internasional Bagian Dari Hukum Nasional	158

DAFTAR PUSTAKA.....	160
----------------------------	------------

LAMPIRAN UUD NRI 1945.....	164
-----------------------------------	------------

I

PENDAHULUAN

Pengantar Hukum Indonesia (PHI) beberapa tahun lalu disebut sebagai Pengantar Tata Hukum Indonesia (PTHI). PHI merupakan mata kuliah dasar pada Fakultas Hukum di seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia yang memiliki fakultas hukum yang harus dipelajari oleh setiap mahasiswa yang belajar ilmu hukum, khususnya hukum positif Indonesia atau hukum yang sedang berlaku (*iusconstitutum*) sebagai obyek PHI.

Pengantar Hukum Indonesia (PHI) bagi yang mempelajarinya, tidaklah dimaksudkan agar mahasiswa langsung dapat secara profesional mempraktikkan bagaimana hukum itu dalam operasional pada setiap lembaga hukum atau bagi siapa yang berhubungan dengan masalah hukum dalam kehidupannya.

Akan tetapi PHI bertujuan untuk memperkenalkan secara sadar dan mendasar pada mereka yang sedang belajar ilmu hukum (khususnya para mahasiswa Fakultas Hukum diseluruh Indonesia). Jadi semacam pengenalan dini untuk bagi setiap orang atau mahasiswa mengenai hukum dalam konteks hukum positif atau hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Yakni bagaimana tatanan hukum yang sedang berlaku di Indonesia sesuai dengan pemahaman atau pengertian tata hukum itu sendiri. Tatanan hukum yaitu tidak lain daripada susunan tentang aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan hukum yang sedang berlaku di Indonesia.

A. Tujuan Mempelajari PHI

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui secara sederhana bahwa tujuan mempelajari PHI sebagai bentuk tata hukum Indonesia ialah "Untuk mengetahui jenis-jenis hukum yang sedang berlaku sekarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Menurut Prof. Kusumadi Podjosuwojo, dalam bukunya Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia antara lain dinyatakan: "Siapa saja yang mempelajari Tata Hukum Indonesia, maksud utamanya ialah ingin mengetahui perbuatan/tindakan manakah yang menurut hukum sebagai perbuatan melawan hukum, bagaimanakah kedudukan seseorang di dalam masyarakat, apakah kewajiban-kewajiban dan wewenangnya, semua itu menurut hukum Indonesia".

Menurut penulis, bahwa Pengantar Hukum Indonesia (yang saya sebut juga sebagai Tata Hukum Indonesia) bertujuan untuk mempelajari dan memahami perbuatan atau tindakan-tindakan yang bagaimana seharusnya orang berperilaku dalam hubungan satu sama lain, termasuk hubungan dengan negara, apa dan bagaimana hak dan kewajiban masing-masing menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Maksudnya adalah agar keseluruhan aturan-aturan hukum tersebut dapat juga diketahui apakah hukum yang demikian itu masih berlaku atau jika sudah tidak berlaku bagaimana dengan perubahan atau pembaharuannya. Dengan demikian dapat pula memberikan pelajaran yang bersifat sejarah bilamana tata hukum yang demikian itu mengalami perubahan atau pembaharuan ataupun perkembangan dalam keberlakuannya.

Masih tentang tujuan mempelajari Pengantar Hukum Indonesia (PHI), ialah bahwa untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa fakultas Hukum tentang ilmu hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) atau hukum yang sedang berlaku di Indonesia sebagai langkah pertama dalam memahami hukum pada tingkat perguruan tinggi, khususnya mahasiswa strata satu (S1), sebagai dari satu sisi ilmu pengetahuan, yakni ilmu pengetahuan hukum.

Selain daripada itu, Pengantar Ilmu hukum Indonesia sedikit banyak berbicara tentang hukum yang sedang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis untuk mengantarkan

para mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum untuk mengetahui memahami dasar-dasar yang sangat fundamental dan mendasar tentang berbagai macam bidang hukum seperti hukum administrasi, hukum tata Negara, hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, hukum adat, bahkan hukum islam. Karena, sebagaimana diketahui secara konstitusional, hukum di Indonesia dikenal dua bentuk, yaitu bentuk hukum yang tertulis, dan bentuk hukum yang tidak tertulis. Hal ini sangat jelas disebutkan dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.

Jadi, tujuannya adalah untuk memperoleh pelajaran yang mendasar mengenai hukum dan tata hukum Indonesia sebagai lanjutan pengetahuan dasar yang diperoleh dari pelajaran Pengantar Ilmu Hukum (PIH). Atas dasar yang demikian itu, maka dapat diketahui pula bahwa hubungan antara PHI dengan PIH sangat erat. Keeratan hubungan yang demikian itu di mana PIH telah memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa fakultas hukum tentang pengertian "Ilmu hukum dalam arti yang umum dan luas, sedangkan PHI dapat memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa mengenai ilmu pengetahuan hukum dalam arti lingkup dalam Negara Indonesia, yaitu ilmu hukum positif yang berlaku di Indonesia.

B. Persamaan dan Perbedaan PIH dan PHI

Adapun persamaan dan perbedaan antara PIH dan PHI (PTHI)¹ antara lain:

1. Baik PIH maupun PTHI, sama-sama merupakan mata kuliah dasar, keduanya merupakan mata kuliah yang mempelajari hukum secara umum;
2. PIH merupakan terjemahan langsung dari bahasa Belanda "*inleiding tot de Rechtwetenschap*" sejak tahun 1942 yang juga sebagai terjemahan dari istilah (bahasa) Jerman "*Einführung in die Rechtswissenschaft*" pada akhir abad ke-

¹ Asikiin, Zainal, 2013, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Genta Press, Yogyakarta.

Menurut Prof. Kusumadi Podjosuwojo, dalam bukunya Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia antara lain dinyatakan: "Siapa saja yang mempelajari Tata Hukum Indonesia, maksud utamanya ialah ingin mengetahui perbuatan/tindakan manakah yang menurut hukum sebagai perbuatan melawan hukum, bagaimanakah kedudukan seseorang di dalam masyarakat, apakah kewajiban-kewajiban dan wewenangnya, semua itu menurut hukum Indonesia".

Menurut penulis, bahwa Pengantar Hukum Indonesia (yang saya sebut juga sebagai Tata Hukum Indonesia) bertujuan untuk mempelajari dan memahami perbuatan atau tindakan-tindakan yang bagaimana seharusnya orang berperilaku dalam hubungan satu sama lain, termasuk hubungan dengan negara, apa dan bagaimana hak dan kewajiban masing-masing menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Maksudnya adalah agar keseluruhan aturan-aturan hukum tersebut dapat juga diketahui apakah hukum yang demikian itu masih berlaku atau jika sudah tidak berlaku bagaimana dengan perubahan atau pembaharuannya. Dengan demikian dapat pula memberikan pelajaran yang bersifat sejarah bilamana tata hukum yang demikian itu mengalami perubahan atau pembaharuan ataupun perkembangan dalam keberlakuannya.

Masih tentang tujuan mempelajari Pengantar Hukum Indonesia (PHI), ialah bahwa untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa fakultas Hukum tentang ilmu hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) atau hukum yang sedang berlaku di Indonesia sebagai langkah pertama dalam memahami hukum pada tingkat perguruan tinggi, khususnya mahasiswa strata satu (S1), sebagai dari satu sisi ilmu pengetahuan, yakni ilmu pengetahuan hukum.

Selain daripada itu, Pengantar Ilmu hukum Indonesia sedikit banyak berbicara tentang hukum yang sedang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis untuk mengantarkan

para mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum untuk mengetahui memahami dasar-dasar yang sangat fundamental dan mendasar tentang berbagai macam bidang hukum seperti hukum administrasi, hukum tata Negara, hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, hukum adat, bahkan hukum islam. Karena, sebagaimana diketahui secara konstitusional, hukum di Indonesia dikenal dua bentuk, yaitu bentuk hukum yang tertulis, dan bentuk hukum yang tidak tertulis. Hal ini sangat jelas disebutkan dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.

Jadi, tujuannya adalah untuk memperoleh pelajaran yang mendasar mengenai hukum dan tata hukum Indonesia sebagai lanjutan pengetahuan dasar yang diperoleh dari pelajaran Pengantar Ilmu Hukum (PIH). Atas dasar yang demikian itu, maka dapat diketahui pula bahwa hubungan antara PHI dengan PIH sangat erat. Keeratan hubungan yang demikian itu di mana PIH telah memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa fakultas hukum tentang pengertian "Ilmu hukum dalam arti yang umum dan luas, sedangkan PHI dapat memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa mengenai ilmu pengetahuan hukum dalam arti lingkup dalam Negara Indonesia, yaitu ilmu hukum positif yang berlaku di Indonesia.

B. Persamaan dan Perbedaan PIH dan PHI

Adapun persamaan dan perbedaan antara PIH dan PHI (PTHI)¹ antara lain:

1. Baik PIH maupun PTHI, sama-sama merupakan mata kuliah dasar, keduanya merupakan mata kuliah yang mempelajari hukum secara umum;
2. PIH merupakan terjemahan langsung dari bahasa Belanda "*inleiding tot de Rechtwetenschap*" sejak tahun 1942 yang juga sebagai terjemahan dari istilah (bahasa) Jerman "*Einführung in die Rechtswissenschaft*" pada akhir abad ke-

¹ Asikiin, Zainal, 2013, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Genta Press, Yogyakarta.

19. Sedangkan PHI (dahulu disebut PTHI) merupakan terjemahan dari "*Inleiding tot her positiefrechts van Indonesie*".

3. Istilah "Pengantar" dalam PIH berarti menunjukkan jalan ke arah cabang-cabang ilmu hukum (*rechtsvakken*) yang sebenarnya. Sedangkan istilah "Pengantar" dalam PHI (PTHI) berarti menunjukkan fungsi mata kuliah itu sebagai pembantu, petunjuk jalan yang di dalamnya terkandung dua unsur, ringkas (*overzichtelijk*) tetapi meliputi seluruhnya. Obyek (kedua) mata kuliah ini berlainan. PHI berobyek kepada tata hukum yang sedang berlaku di Indonesia sekarang maupun yang telah lalu (hukum dalam sejarah). Jadi khusus terhadap hukum positif di Indonesia. Sedangkan PIH, obyeknya adalah aturan-aturan hukum pada umumnya, tidak terbatas pada aturan hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu saja;
4. Hubungan PIH dan PHI, bahwa PIH menjadi dasar dari PHI, yang berarti bahwa untuk mempelajari PHI, terlebih dahulu harus mempelajari PIH sebagai terminal umum;
5. Bahasan dari PIH adalah mengenai pokok-pokok dan prinsip-prinsip, keadaan, maksud dan tujuan dari bagian-bagian hukum yang paling mendasar serta berkaitan/tata hubungan antara bagian-bagian yang paling mendasar tersebut dengan hukum sebagai ilmu pengetahuan.

Tata Hukum (dalam PHI, pen) dapat diartikan sebagai susunan hukum yang berasal dari istilah *recht orde* (bahasa Belanda). Susunan hukum itu terdiri dari aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa sehingga orang mudah menemukannya bila suatu ketika membutuhkannya guna menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat...² Dengan demikian, tujuannya adalah untuk

² Ibid...

mempertahankan dan memelihara mekanisme tata tertib berdasar hukum dalam masyarakat.

C. Manusia Sebagai Bagian Dari Tata Hukum

Mahasiswa fakultas hukum merupakan bagian dari makhluk social (*social entity*) atau makhluk yang bergaul (*zoon politicon*, sebagaimana istilah yang digunakan oleh filsuf Yunani, **Aristoteles**) dalam arti yang umum. Artinya, ia adalah bagian dari keseluruhan masyarakat manusia yang memiliki hak untuk berkehendak dan untuk berkumpul serta berserikat. Sebagaimana ungkapan seorang filsuf Yunani termasyhur dahulu kala bernama Aristoteles yang menyebut manusia itu sebagai "*zoon politicon*" (hewan politik). Yaitu manusia sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya selalu mempunyai keinginan untuk berkumpul dengan manusia-manusia lainnya (makhluk bermasyarakat).³

Alquran menyebutnya sebagai "*Khalifatun fil-Ardhy*" 'Pengatur Bumi'.⁴ Cicero menyebutnya sebagai "*iby ius, uby so-cietas*". 'Di mana ada hukum maka di situ masyarakat'. Atau, jika dibalik, di mana ada masyarakat, maka di situ ada hukum.

Menurut Aristoteles yang adalah murid dari Plato yang mencoba mengurai pendapat Plato tentang manusia sebagai "hewan politik" berpandangan, bahwa ... Bentuk tertinggi persahabatan manusia hanya dapat ditemukan dalam Negara. Ini mendorong timbulnya pertanyaan bagaimana Negara sebaiknya (seharusnya, pen) diatur. Aristoteles mengingatkan kembali tentang Negara menurut Plato, bahwa untuk Negara ada tiga bentuk konstitusi yang baik. Pertama, adalah bentuk monarki atau kerajaan yang berarti kepala Negara hanya ada satu orang. Agar sistem konstitusi bentuk

³ Simorangkir, Wirdjono Sastropranoto, 1960, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.

⁴ Alquran, Surah Albaqarah ayat (30).

monarki baik, ia tidak boleh berubah/melenceng menjadi 'tirani', yaitu jika ada seorang pemimpin mengatur Negara hanya demi kepentingannya sendiri. Kemudian bentuk konstitusi yang baik kedua ialah "Aristokrasi" yang di dalamnya ada sekelompok besar atau kecil pemimpin. Bentuk konstitusi ini hendaknya tidak boleh melenceng menjadi 'oligarki' yaitu pemerintahan yang hanya dijalankan oleh beberapa orang saja. Bentuk yang baik ketiga, ialah Aristoteles menamainya *polity* yang berarti demokrasi. Tetapi bentuk ini juga mempunyai aspek negative. Suatu demokrasi dapat dengan cepat berkembang menjadi pemerintahan oleh kawan-kawan (*mob rule*). Perhatikanlah! Jika si tiran Hitler tidak menjadi kepala Negara Jerman. Semua anggota Nazi di bawahnya dapat membentuk *mob rule* yang mengerikan.⁵ Cobalah kita bandingkan sistem demokrasi desentralisasi di Indonesia yang menggunakan pola otonomi daerah.

Menurut Simorangkir dan Wirjono Sastropranoto, menyebutkan bahwa "Masyarakat" artinya kelompok manusia terdiri dari orang-orang yang masing-masing merasa dirinya termasuk dan terikat dalam suatu golongan, di mana terdapat peraturan-peraturan yang berlaku terhadap mereka itu, di bawah pimpinan seorang atau lebih sebagai pemuka. Itulah yang disebut masyarakat.⁶ Masyarakat yang pertama kali menghuni muka Bumi ini ialah Adam dan Hawa, beserta keempat orang anak-anaknya yang terdiri dari dua orang laki-laki dan dua orang anak perempuan. Antara lain Qabil dan Habil. Hukum yang pertama kali mengatur kehidupan manusia ialah "Hukum perkawinan dengan cara silang antar bersaudara". Perbuatan pidana yang pertama kali terjadi di muka Bumi ialah tidak pidana pembunuhan antara Qabil dan Habil.

⁵ Jostein Gaarder, 1991, *Dunia Sophie Sebuah Novel Filsafat*, Pengantar, Prof. Frans Magnis Suseno, Miszan, hml. 192-193.

⁶ *ibid*

Kejadian itu kira-kira puluhan milliard tahun yang lalu.⁷

Dalam Alquran, masyarakat disebut "*Sy'u'uban waqabaaila*". Masyarakat yang terdiri dari "Suku-suku" dan bangsa-bangsa". Jadi ada masyarakat dalam arti lokal, nasional, regional itulah suku-suku, dan ada masyarakat bangsa-bangsa itulah yang disebut perserikatan bangsa-bangsa. Tujuannya agar saling mengenal satu sama lain.

Bagi masyarakat Indonesia berlaku beberapa tatanan (*order*). tatanan mana berlaku untuk memenuhi kebutuhan dalam berkelompok, berserikat atau berkumpul, sehingga dimungkinkan untuk tidak terjadi suatu kesimpangsiuran dalam kehidupan bersama. Tatanan ini dapat juga disebut sebagai suatu konsensus.

Masyarakat Indonesia dalam membentuk suatu keteraturan yang disebut konsensus tersebut diikat pada suatu norma-norma atau kaidah-kaidah. Atas dasar norma-norma atau kaidah-kaidah tersebutlah, maka orang-orang yang terhimpun dalam dunia masyarakat tersebut tunduk atau setidak-tidaknya sadar akan adanya aturan yang dimaksud. Landasan dari aturan-aturan yang dimaksud ialah kaidah atau norma hukum, norma kesusilaan, norma social, norma moral, norma agama, adat istiadat dan norma kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dan masih hidup di dalam masyarakat.

Kecuali itu, Indonesia juga mempunyai sistem tata hukum tersendiri yang disebut hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 12/2012. Umpamanya, Tap MPR XXV/1966 Tentang Pembubaran PKI dan pelarangan penyebaran paham marxisme/komunis dalam wilayah Negara Indonesia, Tap MPR XVI/MPR/1998 Tentang Politik Ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, Tap MPR

⁷ QS, 5: 28-31, juga dikemukakan Kamri dalam *Harmonization of Unwritten Laws as The Cornerstone for Justice Judge's Decision Based on One Supreme Divinity*, 2013, STTS International Proceedings, p. 72

V/MPR/1999 Tentang Timor Timur (telah terlaksanakan), kesemuanya disebut juga hierarki kedua setelah UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Dengan demikian jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia adalah (i) UUD Negara RI 1945; (ii) Tap MPR No. XXV/1966 dan Tap MPR XVI/1999; (iii) UU/ Peraturan Pemerintah Pengganti UU; (iv) Peraturan Pemerintah; (v) Peraturan Presiden; (vi) peraturan daerah provinsi; (vi) peraturan daerah kabupaten/kota.⁸

D. Pengertian Hukum dan Ilmu Hukum

Prof. L.J. van Apeldoorn sendiri berpandangan, bahwa hukum itu tidak mungkin dibuat satu definisi karena hukum memiliki segi-segi yang banyak.⁹ Menurut van Apeldoorn setidaknya ada 9 (sembilan) segi-segi hukum, yaitu:

1. Selain dari definisi, Hukum sebagai gejala sosial,
2. Hukum sebagai segi kebudayaan,
3. Hukum sebagai kaidah (norma),
4. Pengaruh agama, kebiasaan atau adat istiadat, kesusilaan atas hukum itu,
5. Sanksi atas pelanggaran kaidah (norma),
6. Tujuan dari hukum, hukum sebagai alat pengayoman, dan alat revolusi Indonesia,
7. Hukum Positif dan hukum alam,
8. Apa sebabnya orang mentaati hukum? Kekuatan dan Kekuasaan.

⁸ Jakpo Tobing, Ketua PAH I BP MPR/Komisi A. ST MPR 1999-2002. Amandemen UUD 1945. Kompas, 22/10/16

⁹ E. Utrecht-Moh. Saefi Djindang. Pengantar Dalam Hukum Indonesia, 1982. Hlm. 1

9. Pembagian hukum dalam penggolongan-penggolongannya.¹⁰

Pada awal kehidupan manusia misalnya sebagaimana dikisahkan dalam Alqur'an, sebenarnya, bukan hanya manusia yang memiliki tatanan kehidupan yang disebut hukum, tetapi juga masyarakat Jin. Bagi masyarakat manusia, sebagaimana petunjuk Al-qur'an, keteraturan kehidupan hanya bisa dicapai melalui dua cara. Pertama, memperbaiki hubungan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam (*hablun minallah*), dan kedua, menjalin hubungan baik terhadap sesama manusia (*hablun minannas*).

Dalam sejarah kehidupan sejak pertama kali manusia menghuni planet Bumi ini, ada dua jenis hukum yang terjadi secara berurutan. Hukum yang pertama ialah hukum perkawinan, dan kedua hukum pidana. Adapun hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara belum dikenal sama sekali pada waktu itu.

Pertama perlu dikemukakan berkenaan dengan pengertian ilmu hukum. Beberapa pakar hukum mengemukakan tentang pengertian ilmu, antara lain oleh S.C.T. Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, 1989: 15, Balai Pustaka, Jakarta, menyebutkan bahwa ilmu hukum mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat,
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
3. Peraturan bersifat memaksa serta memuat sanksi;
4. Sanksi yang dikandung dalam peraturan-peraturan tersebut adalah tegas bagi siapa saja yang melanggarnya.

Terdapat juga pengertian ilmu hukum yang dikemukakan oleh Gijless yang mengatakan bahwa Ilmu hukum adalah ilmu yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum, dan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang

¹⁰ Ibid, E. Utrecht, hlm. 1-27.

segala seluk beluk mengenai hukum, sehingga ruang lingkup dari ilmu hukum sangatlah luas¹¹.

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa "batas-batasnya tidak bisa ditentukan" (Curzon, 1979: v). Dalam bahasa Inggris ia disebut *jurisprudence*.¹² Jadi, di Barat istilah *jurisprudence* diartikan sebagai "Ilmu Hukum" sedangkan di Indonesia disebut "Putusan hakim". Sekalipun tidak semua putusan hakim disebut *jurisprudence*, melainkan hanya putusan hakim tertentu saja. Misalnya, putusan yang dijadikan rujukan oleh hakim yang berikutnya, putusan mana menunjukkan adanya suatu penemuan hukum yang baru karena perkara *in casu* tidak jelas atau tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sementara hakim pengadilan tidak boleh menolak memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan alasan tidak ada dasar hukumnya yang pasti (dalam undang-undang).

Prof. Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum (2000) mengatakan bahwa ilmu hukum adalah "ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu Negara atau masyarakat tertentu pada suatu waktu". Sedangkan Gustav Radbruch dalam bukunya *Rechtsphilosophie* (1950: 209) mengatakan bahwa Ilmu Hukum adalah ilmu yang mempejari makna obyektif tata hukum positif.¹³ Paul Scholten mengatakan, bahwa Ilmu Hukum yang sesungguhnya

adalah studi yang meneliti hukum yang berlaku sebagai suatu besaran yang terberi ("*de eigenlijke rechtswetenschap* adalah *die studie die het geldende recht al seen g]egeven grootheid onderzekt*")¹⁴.

J.W. Harris mengatakan "*Legal science is that activity ... whose necessary objective is the systematic exposition of some corpus of legislative materials*" Ilmu Hukum adalah kegiatan... yang obyeknya adalah pemaparan seperangkat bahan-bahan legislative.¹⁵

Adapun Aulis Aarnio, bahwa *Legal Dogmatics* maksudnya (Ilmu Hukum) itu adalah "*the study that seeks to put forward statements about the content of valid (i.e. binding) legal norms as well as about the systematic interrelations between them*". Dalam sebutan yang lain disebut "*the doctrinal or analytic study of law*", yang mengemban *two tasks: the interpretation and the systematization of legal norms*. Menurut Aarnio, bahwa yang dimaksud sistematisasi adalah aspek teoretikal dari ilmu hukum. Sedangkan interpretasi adalah aspek praktikal dari Ilmu Hukum atau kata lain mengutamakan sasaran praktikal¹⁶.

Menurut Harold Berman yang memakai istilah *Legal Science*, bahwa Ilmu Hukum itu adalah "*a distinct and systematized body of knowledge, a science, in which individual decisions, rules, and enactments were studied objectively and were explained in terms of general principles and truths basic to the system of legal norms*".

¹¹ Triwulan T. Titik, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustaka, Jakarta, hln. 24

¹² Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, p.3

¹³ Refleksi dan Konstruksi Ilmu Hukum Indonesia, Thafa Media, Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, FH-UNDIP Semarang, 2012, p.18-19. Radbruch dalam kalimatnya "*Diese eigentliche Rechtswissenschaft, die systematis-che, dogmatische Rechtsordnung...*" kann definiert werden als Wissenschaft vom objectiven Sinn positive Rechtsordenunge... Ilmu Hukum yang sesungguhnya ini, ilmu hukum sistematikal, dogmatikal ini, dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang makna obyektive tatanan-tatanan hukum positif.

¹⁴ Ibid... p. 19., Paul Scholten, *DE STRUCTUUR DER RECHT[WETENSCHAP]*, Verzamelde Geschriften I, 1949: 433.

¹⁵ Ibid... p. 19., *Law and Legal Science*, 1979, demikian juga J.W. Harris, Aulis Aarnio yang memakai istilah *Legal Dogmatics*, dan Harold Berman yang memakai istilah *Legal Science*...

¹⁶ Ibid, dalam *Linguistic Philosophy and Legal Theory*, 1979: 19. Dan Juga dalam *Paradigm Articulation in Legal Research*, 1983: 210.

E. Pengertian Tata Hukum Indonesia

Setelah menggambarkan beberapa pengertian Ilmu Hukum, kemudian Sidharta dalam tulisannya berjudul "Struktur Ilmu Hukum", menyebutkan bahwa Obyek telaah Ilmu Hukum adalah tata hukum yang berlaku, yakni sistem konseptual aturan hukum dan putusan hukum yang bagian-bagian pentingnya dipositifkan oleh penguasaan kewenangan hukum yang sah dalam masyarakat atau Negara yang di dalamnya Ilmu Hukum diembankan. Jadi keseluruhan teks otoritatif bermuatan aturan-aturan hukum yang terdiri atas produk perundang-undangan, traktat, ketetapan birokrasi, putusan-putusan hakim, hukum tidak tertulis, dan karya ilmuwan hukum yang berwibawa dalam bidangnya serta diakui yang disebut doktrin.¹⁷

Pengantar Hukum Indonesia, sebelumnya disebut Pengantar Tata Hukum Indonesia. Dalam materi ini, penulis gunakan istilah "Penyusun". Dikatakan demikian karena penulisan ini tidak terlepas dengan sejumlah bahan kuliah atau merupakan kumpulan materi-materi kuliah yang pernah ada dan dimiliki oleh penulis, ditambah dengan pemutakhiran referensi kekinian, di mana seperti diketahui bahwa perkembangan hukum Indonesia terutama sebelum dan setelah era reformasi, tata hukum Indonesia banyak mengalami perubahan paradigma yang cukup signifikan.

Menurut Logemaan dalam bukunya *Het Staatsrecht van Indonesia*, hlm 5-6 sebagaimana dikutip oleh Busroh, bahwa ia, Logemaan membedakan pelajaran tata hukum (dalam arti luas) menjadi dua sistem:

- a. Sistem yang materiel (*materiele stelselmatigheid*). Menyelidiki, melukiskan dan menguraikan tipe dari Negara tertentu, dengan mempelajari peraturan-peraturan yang menentukan corak khas Negara itu serta masyarakat yang

¹⁷ Arief Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum dalam Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*, 2012: 19

bagaimana yang hendak dibentuk (misalnya: masyarakat kapitalis atau sosialis atau liberal dan lain-lain). Jadi, singkatnya sistem yang materiel ini mencari jawaban atas pertanyaan yang berkenaan dengan tipe Negara, dasar pemerintahannya, sifat dan tujuan organisasi maupun masyarakat yang bagaimana yang hendak disusun;

- b. Sistem yang formal (*formeel stelselmatigheid*).

Mempelajari peraturan-peraturan yang menetapkan bagaimana organisasi Negara itu sendiri, cara penyusunannya/ menetapkan alat-alat perlengkapannya/ organ-organnya, wewenang, tugas dan kewajibannya dari alat-alat perlengkapan itu. Dan karena mengenai masalah wewenang, maka Logemaan sistem yang formal ini sebagai *competentie leer* (ajaran tentang wewenang).¹⁸ Sekaligus Logemaan menyebut ini sebagai ajaran tentang *competentie leer*.

Menanggapi pendapat Logemaan tersebut, Harmaily cs dalam bukunya *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, bahwa sistematika ala Logemaan yang menyebutkan "*materiele stelselmatigheid*", itu adalah mengenai asas-asas, sedangkan "*formeel stelselmatigheid*" yakni mengenai pengertian-pengertian.¹⁹

Timbulnya pembagian menjadi sistem *materiele stelselmatigheid* dan sistem *formeel stelselmatigheid* dalam sistematika Logemaan, adalah didasarkan pada ajarannya tentang bahan-bahan hukum (*gegeven van Het recht*), yakni *materiele stelselmatigheid v/h recht* dan *formeel stelselmatigheid v/h recht*.²⁰

¹⁸ Busroh, Abu Daud cs, 1983, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 27-28.

¹⁹ Op cit.

²⁰ Loc cit.

Itu berarti, *gegeven van Het recht* yang dikenal oleh Logemaan dalam ajarannya tentang *competentie leer*, sama dengan yang kita kenal selama ini di Indonesia sebagai sumber hukum materiel dan sumber hukum formiel. Istilah materiel ada juga yang menyebutnya istilah material, sedangkan istilah formiel ada yang menyebutnya dengan istilah formal.

Sekalipun dikatakan bahwa ada pelbagai kumpulan materi kuliah pada masa lalu dijadikan acuan dalam tulisan ini, namun di sana sini tetap dilakukan pemutakhiran-pemutakhiran sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia yang ada dewasa ini. Sebagai contoh, dahulu sebelum reformasi dalam tata hukum Indonesia, salah satu Lembaga Tinggi Negera yang ada ialah Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada presiden untuk suatu tujuan pengambilan kebijakan. Tetapi kemudian dihapus setelah era reformasi. Lalu diganti dengan salah satu lembaga yang mirip dengan DPA yaitu Dewan Pertimbangan Presiden yang disingkat Watimpres. Pada masa Orde Baru, tidak ada yang disebut Komisi Yudisial (KY) serta beberapa lembaga Negara lainnya, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kemudian di DPR terdapat juga DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang di dalamnya terdapat sistem peradilan sumir tersendiri yang disebut Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dan banyak lagi contoh-contoh lainnya dalam perkembangan tata hukum Indonesia setelah reformasi yang belum disebut satu persatu dalam tulisan ini.

Amat terasa bahwa sejak tahun 1980-an hingga sekarang terjadi suatu perkembangan hukum yang cukup signifikan dan urgen, terutama setelah gerakan tuntutan reformasi dan pelaksanaan reformasi itu sendiri yang dimulai pada tahun 1997 hingga saat ini. Yang paling banyak berpengaruh dan mengalami perubahan dalam tata laksana Hukum Indonesia ialah hukum birokrasi (termasuk birokrasi hukum) yang masuk dalam lingkup Hukum Administrasi Negara (HAN), karena pada sentra-sentra lingkup hukum inilah

dituntut kunci-kunci reformasi tersebut. Misalnya, Otonomi Daerah, dan Daerah Otonom, Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dan sub-sistem sistem peradilan lainnya, serta peraturan perundang-undangan tentang pertambangan khususnya undang-undang Mineral dan Batubara, Undang-undang Lingkungan Hidup seperti undang-undang pesisir dan kelautan dan lain-lain.

Tentu saja sajian materi dalam Pengantar Tata Laksana Hukum Indonesia bukanlah merupakan sesuatu yang lengkap dari keseluruhan tata laksana hukum Indonesia, melainkan sebagai pegangan awal bagi mahasiswa Fakultas Hukum (S1) untuk melangkah lebih jauh dalam mengetahui dan mendalami tentang hukum positif Indonesia itu sendiri.

Akan tetapi sebagai bahan rujukan, tentu saja tulisan ini menjadi sangat penting bagi setiap mahasiswa untuk mempelajari hukum secara holistik, sekalipun di sana sini masih perlu penyempurnaan dengan referensi yang lebih baru dan komprehensif.

F. Mekanisme Tata Hukum Indonesia

Sungguhpun Indonesia sudah disebut sebagai Negara hukum (*rechtstaat*), maka dalam pengejawantahan tata hukum atau tertib hukum itu harus tetap pada mekanismenya. Dalam sistem mekanisme yang dimaksud di mana Indonesia cenderung menganut teori *stufenbau theory*-nya Hans Kelsen atau di Indonesia lazim disebut sebagai tata urutan perundang-undangan (*wettenlijkbepalingen*). Dalam tata urutan yang demikian, ada yang disebut *grundnorm*, yaitu Pancasila sebagai sumber segala sumber tertib hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Di samping istilah *Grundnorm*, ada juga istilah *Grondwet*, Belanda (*grond* = dasar, *wet* = undang-undang). Berikut istilah *Grundgesetz*, Jerman. *Grund* = dasar + *gesetz* = undang-undang. Kemudian istilah "*constitutie*", sebagaimana yang ditulis oleh Bursoh cs. Jadi dapat kita katakan bahwa *grundnorm* untuk tata

hukum di Indonesia lebih tinggi kedudukannya daripada *grundgesetz* atau *grundwet* yang berarti undang-undang dasar yang membedakan dengan istilah "*nomoi*" (undang-undang biasa).

Pancasila yang adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup bangsa dan Negara Republik Indonesia, sesungguhnya lahir dan tumbuh dari / dan karena pengaruh sejarah dan perkembangan modern dalam abad ke-20 ini. Pada gilirannya pengaruh perkembangan Negara modern tersebut tidak terlepas dari pengaruh pemikiran tentang Negara dan hukum yang sudah berlangsung sejak berabad-abad yang lalu serta melahirkan berbagai falsafah dan faham tentang (hukum, pen) masyarakat, dan negara. Dalam hubungan yang demikian, Pancasila ditempatkan pada aspek yang universal.²¹ Dalam pandangan serta sifat yang universalitas yang demikian, maka tidak selayaknya ada yang mengatasi itu serta alasan apapun itu, termasuk dengan alasan Hak Asasi Manusia.

G. Obyek Pengantar Hukum Indonesia

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar Negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan yang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpeliharaan dalam praktik penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis.

Memang untuk menyelidiki hukum dasar (*droit constitutionnel*) suatu Negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-Undang Dasar-nya (*loi constitutionnelle*) saja,

²¹ Soehardjo, 1990, Konstitusi dan Demokrasi, Beberapa Pemikiran Tentang Hukum, Dahara Prize, Semarang

akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana praktiknya dan bagaimana suasana kebatinannya (*geistlichen hintergrund*) dari Undang-Undang Dasar itu. Dengan demikian dapat dimengerti, bahwa obyek dari hukum tata Negara ialah di samping menyelidiki, menganalisis, bahkan jika perlu dilakukan suatu perubahan terhadap *droit constitutionnel*, dan *loi constitutionnelle*, tetapi obyeknya juga meliputi segala bentuk praktik ketatanegaraan suatu Negara termasuk kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam praktik, baik mengacu kepada aturan-aturan dasar yang bersifat *nomoi* tertulis maupun aturan yang bersifat *loi constitutionnelle*.

H. Sejarah Singkat Tata Hukum Indonesia

Apabila kita berbicara tentang bagaimana sejarah tata hukum yang berlaku di Indonesia, maka kita harus bertitik tolak dari Proklamasi RI pada Tanggal 17 Agustus 1945 sebab sejak saat itu bangsa Indonesia telah mengambil keputusan untuk menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri, yaitu hukum bangsa Indonesia, tata hukumnya yang baru yaitu tata hukum Indonesia. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam memorandum DPRG pada Tanggal 9 Juni 1966, bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah detik penjabaran tertib hukum kolonial dan sekaligus detik pembangunan tertib hukum nasional, tertib hukum Indonesia dan seterusnya. Meskipun demikian, tentunya banyak hal tentang tata hukum itu sendiri sebelum terjadinya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945, belum sempat digambarkan pada bagian ini.

Dengan demikian jiwa proklamasi itu mengandung dua arti yaitu:

- Menegarakan Indonesia menjadi suatu negara yang merdeka dan berdaulat
- Pada saat itu menetapkan tata hukum Indonesia sekedar mengenal bagian yang tertulis

Dengan ditetapkannya oleh PPKI UUD RI yaitu UUD 1945

pada tanggal 18 agustus 1945 maka UUD itulah yang tertulis Tata hukum indonesia. Sekedar mengenal bagian yang tertulis Tata UUD tersebut hanyalah memuat ketentuan-ketentuan dasar tata hukum indonesia sehingga masih perlu ditetapkan lebih lanjut sebagai ketentuan dalam UUD organik. Ialah karena sampai sekarang belum juga banyak UU organik seperti dimaksud diatas, maka untuk sekedar mengisi kekosongan hukum melalui ketentuan pasal II aturan peralihan UUD 45 diberlakukan banyak peraturan-peraturan yang berasal dari zaman Hindia Belanda tadi.

Akan tetapi walaupun demikian ini tidaklah berarti bahwa tata hukum indonesia itu merupakan kelanjutan dari tata hukum hindia belanda, sebab peraturan-peraturan yang dikemukakan itu sifatnya sementara saja, selama belum diganti dengan yang baru, dan sekedar tidak bertentangan dengan jiwa UUD 45.

Sehubungan dengan itu adalah menjadi tugas tata hukum di indonesia untuk menilai kembali ketentuan-ketentuan dalam peraturan hindia belanda tadi, dan menggantinya dengan peraturan-peraturan masyarakat indonesia yang dirasakan sesuai dengan rasa keadilan dan dapat menuju ke cita-cita yang dikehendaki.

Karena itu, ada dua faktor yang akan mendesak diambilnya sikap progresif tentang perkembangan tata hukum di Indonesia yaitu:

- a. Keinginan untuk menghapuskan peninggalan pemerintah kolonial secepatnya
- b. Harapan harapan yang ditimbulkan pada masyarakat dengan tercapainya kemerdekaan, dan setelah kemerdekaan itu sendiri.

Dengan demikian wajarlah apabila pemikiran hukum yang ditawarkan oleh pemerintah kolonial digantikan dengan suatu pemikiran hukum yang lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun negara Republik Indonesia.

I. Perkembangan Politik Hukum Nasional di Indonesia

Berbicara tentang hukum politik nasional dari suatu bangsa atau negara perlu terlebih dahulu diketahui apa arti dari politik hukum itu. Yang diartikan politik hukum di sini ialah suatu ilmu yang berusaha membuat hukum itu berada pada ranah kebijakan pemerintah yang menentukan bagaimana seharusnya pemerintah yang sah bertindak dan menjalankan roda pemerintahan.

Istilah politik hukum menurut Muhammad Sadi Is, terjemahan dari istilah Bahasa Belanda *rechtspolitiek*.²² Menurut saya, ini keliru karena bahasa Belanda tidak menggunakan struktur bahasa dengan pola diterangkan menerangkan (DM) sebagaimana pola bahasa Inggris. Yang benar ialah istilah yang digunakan oleh Hance van Maarseveen yaitu *politiekrecht* yang dapat dimaknai sebagai hukum tata Negara. Memang benar antara *politiekrecht* (politik hukum) dan *rechtspolitiek* (hukum politik) memiliki makna yang berbeda. Karena kedua istilah itu bukan saja berbeda struktur kata, tetapi juga membawa implikasi makna yang jauh berbeda pula. Dari sini, pengertian yang ditawarkan oleh Maarseveen dapat diterima yang mengartikan *politiekrecht* sebagai hukum tata Negara.

Menurut Van der Tas yang menggambarkan istilah *politiek* berdasarkan Kamus Bahasa Belanda, diartikan sebagai *bleid*. *Bleid* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai *policy* (Inggris) atau kebijakan. Karena Bahasa Indonesia sama dengan struktur Bahasa Belanda, maka istilah *politiekrecht* sebagai arti dari politik hukum terasa jauh lebih tepat. Sebab memang politik hukum menurut tata bahasa Indonesia lebih mengarah kepada makna kebijakan atau rencana dan langkah-langkah strategis pemerintah dalam mengelola tatanan pemerintahan.²³

²² Sadi Is, Muhammad, 2015, *Etika Hukum Kesehatan; Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

²³ Ahmad, Kamri, *Politik Hukum Berbasis Ekonomi, Masalah-Masalah Hukum*, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum UNDIP, Vol. XXXII Nomor. 3 Juli-September 2003, p.188

Ia hendak menyelidiki perkembangan-perkembangan dan perubahan yang harus diadakan dalam hukum yang sedang berlaku, agar sesuai dan serasi dengan dan rencana serta mewujudkan dalam bentuk kenyataan-kenyataan sosial (*social warkellyhald*). Dan berusaha untuk melenyapkan sebanyak mungkin ketegangan-ketegangan antara *positiviteit* dan *social warkellyhald*.

Karena itu politik hukum hendak membuat sesuatu *Ius Constituendum* yang akan menggantikan *Ius Constitutum*, dan berusaha agar *Ius Constituendum* dikemudian hari dapat berlaku sebagai *Ius Constitutum* yang baru.

Pada hakikatnya yang dapat menjalankan politik hukum itu ialah *The Ruling Class* yang ada dalam masyarakat, dan apabila hal itu dihubungkan dengan negara maka politik hukum itu banyak-banyak ditentukan oleh siapa yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan yang sah sebagai *the ruling class*.

Dalam mengarahkan hukum sebagai alat untuk mengintegrasikan ke dalam perkembangan kehidupan masyarakat demi terlaksananya tujuan hukum yang dicita-citakan. Sesuai pengertian politik hukum sebagai mana yang dikemukakan di atas timbul pertanyaan, bahwa bagaimanakah seyogyanya politik hukum nasional bangsa Indonesia?

Dari sejarah perkembangan tata hukum Indonesia sebagaimana sudah dijelaskan terlebih dahulu dapat diketahui bahwa politik hukum bangsa Indonesia banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh siapa yang pernah berkuasa di Indonesia, di samping politik hukum luar negeri tentunya. Untuk yang terakhir ini, muncullah suatu penekanan tersendiri, bahwa politik hukum luar negeri Indonesia ialah politik bebas aktif untuk mencapai perdamaian dunia yang aman dan tertib.

Pada waktu pemerintah Hindia Belanda berkuasa di Indonesia jelas bahwa yang menjadi politik hukum Indonesia

adalah selaras dengan politik hukum pemerintah Hindia Belanda berdasarkan asas konkordansi. Yang pada dasarnya berorientasi kepada berlakunya hukum barat iugusi hukum barat secara positif di Indonesia. Utamanya lapangan hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Seperti yang digariskan pada Pasal 131 *Indiacht Staats Regeling*.

Dalam lapangan hukum ini pemerintah Hindia Belanda menganut politik hukum yang bersifat dualistik yaitu di samping berlaku sistem hukum barat, berlaku pula sistem hukum adat atau hukum golongan pribumi.

Atas dasar politik hukum pemerintah Hindia Belanda tersebut, lahirlah beberapa ketentuan dan peraturan-peraturan seperti:

- Staatblaad 1917/12 menganut tentang penunjukan secara suka rela kepada hukum perdata Eropa sehingga politik hukum Hindia Belanda pada waktu itu terhadap hukum yang bukan hukum barat adalah sangat diskriminatif (membeda-bedakan).
- Kemudian, sesudah Indonesia merdeka tentu politik hukum semacam itu harus disingkirkan dan diganti dengan politik hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945, yang setelah Amandemen disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Untuk mengetahui bagaimana seharusnya politik hukum Indonesia, maka biasanya kita harus bertitik tolak pada UUD yang memuat "sendi-sendi pokok negara" bersangkutan dan "dasar-dasar pokok hukum" yang akan diikuti oleh negara itu. Itulah sebabnya ia disebut hukum dasar atau konstitusi.

Di dalam undang-undang dasar negara kita yang berlaku sekarang yaitu UUD NRI Tahun 1945 tidak ada satu pasal pun yang memuat istilah politik hukum yang dapat dijadikan dasar bagi pembentukan suatu tata hukum baru di Indonesia. Hal ini menurut TEUKU MUH. RADHIE, SH, dalam Prisma Nomor: 6 Tahun

ke-II Desember 1973 halaman 4, bahwa mungkin disebabkan karena pembuat UUD 1945 dengan sadar hendak menentukan pagi-pagi hukum nasional yang bagaimana sebaiknya berlaku bagi masyarakat bangsa Indonesia yang baru saja merdeka.

Mengingat transformasi yang baru terjadi dari suasana penjajahan ke alam kemerdekaan berlangsung dalam tempo yang cepat dan singkat pada saat baru berlakunya perang dunia ke-II, dan pada waktu itu orang belum dapat menggambarkan/membuat perkiraan tentang bagaimana masyarakat bangsa di dunia akan berhubungan satu sama lain setelah perang usai.

Akan tetapi meskipun demikian, ini tidaklah berarti bahwa bangsa Indonesia tidak mempunyai politik hukum tersendiri, sebab apabila kita perhatikan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, dikemukakan terdapat adanya petunjuk mengenai politik hukum dari Negara Republik Indonesia, kendatipun sifatnya hanya sementara saja.

Dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 itulah yang menjadi dasar hukum berlakunya tata hukum Hindia Belanda di Indonesia hingga saat ini sekedar untuk mengisi kekosongan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945

Dalam UUDS 1950 terdapat ketentuan yang mengandung unsur politik hukum bagi Negara Indonesia yaitu Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

Hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana sipil maupun hukum pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana susunan dan kekuasaan pengadilan diatur dengan UU dalam kitab hukum kecuali jika perundang-undangan menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam UU tersendiri.

Akan tetapi dengan berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali. Maka segala ketentuan yang tercantum dalam UUDS 1950 termasuk Pasal 102 tentu tidak

berlaku lagi, sehingga pemegangan kita untuk politik hukum Negara RI kembali kepada Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945.

Dengan dibentuknya suatu lembaga yang disebut Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, sekarang berubah namanya menjadi Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN), yaitu suatu lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan pembentukan dan pembinaan hukum nasional sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam Tap MPRS NO:II/MPRS/1960, maka jelaslah apa yang menjadi politik hukum nasional bangsa Indonesia.

BPHN ini bertugas antara lain:

- a. Meletakkan dasar dasar tata hukum nasional
- b. Mengganti peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan tata hukum Indonesia
- c. Menetapkan masalah-masalah yang belum diatur dalam perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Tap MPR Nomor: IV/MPR/1978 Tentang GBHN telah menggariskan apa yang menjadi politik hukum nasional bangsa Indonesia sebagai berikut:

1. Pembangunan di bidang hukum Negara RI didasarkan atas landasan sumber tertib hukum seperti yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.
2. Pembangunan dan pembinaan di bidang hukum diarahkan agar hukum memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga dapatlah diciptakan ketertiban dan kepastian hukum dan memperlancar pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka yang demikian itu perlu dilanjutkan usaha-usaha sebagai berikut:
 - a. Menertibkan badan-badan penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing;

- b. Meningkatkan kemampuan dan kewajiban aparat penegak hukum;
 - c. Membina penyelenggaraan bantuan hukum untuk golongan masyarakat yang kurang mampu.
3. Meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga menghayati hak dan kewajibannya dan mengingatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum dan ke arah tegaknya hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945
 4. Mengusahakan terwujudnya peradilan kekuasaan negara;
 5. Dalam usaha pembangunan hukum nasional perlu ditingkatkan langkah-langkah untuk menyusun perundang-undangan yang menyangkut hak kewajiban asasi warga negara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan UUD 1945;

Dari pernyataan politik MPR tersebut di atas dapat disimpulkan adanya dua tahap pembangunan hukum yaitu:

a. **TAHAP PEMBANGUNAN HUKUM JANGKA PANJANG**

Yang bertujuan mengganti tata hukum yang sekarang dengan tata hukum yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang mengalami proses di bidang pembangunan. Pembangunan hukum di sini harus mencakup segala lapangan hukum yang mengatur tata hukum kehidupan masyarakat, baik lapangan hukum perdata, pidana, ataupun hukum acara dan sebagainya.

b. **TAHAP PEMBANGUNAN HUKUM JANGKA PENDEK**

Pembangunan hukum tahap ini bersifat sektoral yaitu

pembangunan pada yang menyangkut cabang hukum tertentu.

J. Perkembangan Sistem Peradilan di Indonesia

Sebelum Amandemen UUD NRI Tahun 1945, Kekuasaan Kehakiman tertinggi hanya ada pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA). Akan tetapi setelah Amandemen UUD NRI 1945, khususnya Amandemen ketiga yang disahkan pada tanggal 09 November 2001, maka Kekuasaan Kehakiman berkembang yang ditandai dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY-RJ).

Perkembangan sistem peradilan yang demikian itu, melalui Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh suatu Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi perkembangan yang paling mendasar dalam sistem peradilan di Indonesia setelah Amandemen ialah kehadiran MK dan KY-RJ.

Terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara MA dan MK dalam proses pengambilan putusan hakim. MA dalam mereview suatu aturan hukum yakni aturan hukum yang ada di bawah undang-undang. Sedangkan MK meninjau suatu undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Terhadap Putusan Hakim pada MA, ada yang disebut upaya-upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Sedangkan pada MK, putusan Mahkamah disebut sebagai putusan pertama dan terakhir. Selain dari itu, MK juga disebut sebagai *the guardian of constitution*. Kemudian muncul fungsi baru Mahkamah dengan sebutan *the guardian of states ideology*, sebagaimana putusan Mahkamah Nomor: 82/PUU-XVII/2018.

Demikian pula tentang kehadiran Komisi Yudisial Republik Indonesia berdasarkan UU. Nomor: 18/2011 sebagai Perubahan atas UU. Nomor: 22 Tahun 2004, menambah semaraknya demokratisasi penegakan hukum di bidang kehakiman. Misalnya: 1) KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. 2) Menjaga keluhuran dan martabat perilaku hakim. 3) menetapkan KEPPH dengan MA, 4) Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Serta banyak lagi tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KY terkait dengan sistem peradilan mulai dari MA hingga lembaga-lembaga peradilan yang berada di bawahnya, hal mana sebelumnya tidak dikenal.

Riwayat Penulis

Buku tentang Pengantar Hukum Indonesia ini, merupakan buku yang penulis tulis yang telah dipersiapkan agak lama, sedikit berbeda nuansa pembahasannya dengan buku-buku pengantar Hukum Indonesia lainnya yang disebut Pengantar Tata Hukum Indonesia (PTHI), sekalipun buku-buku PTHI itu tetap juga menjadi bacaan penulis dan beberapa hal baru.

Buku ini dihadapkan sebagai pengantar bacaan bagi para mahasiswa di Fakultas Hukum yang merefleksikan suasana hukum ala Indonesia tentang pelajaran-pelajaran dasar dari hukum selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum. Namun perlu diketahui bahwa buku ini bersifat pengantar untuk masuk pada ranah atmosfir jagad raya hukum yang amat luas lagi. Artinya, buku ini merupakan pemahaman awal guna mengenal ranah hukum secara spesifik dan khas seperti hukum pidana, administrasi neraga, hukum tata Negara dan hukum perdata dan lain-lain. Oleh sebab itu, dapat juga dibaca oleh mahasiswa tingkat lanjutan dalam hal ini S2 dan S3 sebagai referensi.

Kamri Ahmad (lahir di Sidrap, 27 Desember 1959), menempuh pendidikan SD, Madrasah Tsanawiah, Aliah di Baranti, Sidrap, kemudian pada Fakultas Hukum (SH) Universitas Muslim Indonesia Makassar 1989, melanjutkan studi pada Program Magister Ilmu Hukum (S2) UNDIP Semarang 1997, dan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum UNDIP 2007 dalam konsentrasi Sistem Peradilan Pidana. Dosen pada Fakultas Hukum UMI Makassar sejak tahun 1990 – sekarang. Jabatan Lektor Kepala, IV.c tahun 2008.

Sebagai Dosen di S1, dan S2, S3 Pascasarjana UMI, Penulis pernah mengajar sebagai dosen luar biasa di IAIN Alauddin (kini UIN) Makassar, baik S1 maupun S3 antara tahun 1999 – 2003, 2009-2010, juga di Unismuh Bau-Bau, Palu, dan Universitas Gorontalo. Di samping itu, penulis juga berprofesi sebagai Advokat sejak 2000 hingga sekarang yang tergabung dalam organisasi AAI dan PERADI.

Penulis kedua ialah Andi Khaedhir K. Petta Lolo, lahir di Semarang, 10 Februari 1995, dan lulus S1 UIN Makassar Mei 2017, S2 Program Ilmu Hukum Pascasarjana UMI 2018.

ISBN 978-602-8828-66-6

Anggota IKAPI, Nomor : 017/SSL